

BAUBAU JADI PINTU MASUK INVESTASI CORNHOUSE, PABRIK METE 30 RIBU TON DIKAJI

Cornhouse B.V., perusahaan perdagangan asal Rotterdam, Belanda, mengkaji pembangunan pabrik pengolahan mete dengan kapasitas bahan baku hingga 30 ribu ton per tahun di Sultra.

KAPASITAS PABRIK
Mampu mengolah 30 ribu ton bahan baku per tahun menjadi sekitar 8 ribu ton mete olahan atau 1.800 ton per bulan.

LOKASI KAJIAN
Studi kelayakan mencakup Baubau, Muna, Buton, hingga Kendari untuk memastikan ketersediaan dan kualitas bahan baku.

KEBUTUHAN BAHAN BAKU
Pengiriman mete saat ini mencapai 6 kontainer per hari dengan pertumbuhan pasar sekitar 7% per tahun.

HARGA BELI DARI PETANI
Cornhouse memproyeksikan harga pembelian mete mentah dari petani lokal dapat mencapai Rp35.000/kg.

DAYA SAING PRODUK
Dengan rendemen 285 gram/kg, produk olahan Sultra masih kompetitif dengan mete Vietnam di kisaran Rp116.000/kg.

PASOKAN BAHAN BAKU
Jika pasokan Sultra belum mencukupi, bahan baku akan ditopang dari Sulsul, Sulteng, hingga Flores. Saat panen raya, disiapkan mekanisme stok.

SEJARAH & POTENSI METE SULTRA
Mete dikembangkan sejak 1970-an untuk penghijauan lahan kritis, sebagian tanaman telah berumur lebih dari 30 tahun. Pada 1997, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kendari mencatat mete sebagai komoditas andalan Sultra. Sultra berpeluang jadi basis pengolahan mete untuk pasar internasional, bukan hanya pemasok bahan mentah.

Laporan: Prasetyo M, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Potensi mete Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menarik perhatian investor global. Cornhouse B.V., perusahaan perdagangan asal Rotterdam, Belanda, tengah melakukan studi kelayakan untuk membangun pabrik pengolahan mete dengan kapasitas bahan baku hingga 30 ribu ton per tahun di Sultra.

Rencana tersebut mencakup pembangunan fasilitas pengolahan yang dipusatkan di satu lokasi terpadu. Dari kapasitas bahan baku tersebut, perusahaan diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 8 ribu ton mete olahan per tahun atau sekitar 1.800 ton per bulan. Kajian dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku sekaligus memastikan kualitas mete di Baubau, Muna, Buton,

hingga Kendari. Representative Cornhouse B.V. Mohammad Andriza Syarif mengatakan kajian itu juga diselenggarakan dengan program penanaman mete Kementerian Pertanian di sejumlah

wilayah. Menurut dia, keberadaan industri pengolahan di sentra bahan baku dapat mempersingkat rantai perdagangan yang selama ini membuat hasil panen petani melewati sejumlah perantara sebelum masuk ke pasar internasional. "Hasil studi ini menjadi bahan pengambilan keputusan kami untuk melanjutkan proses pembangunan pabrik," kata Andriza se usai menemui

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026).

Kebutuhan bahan baku menjadi salah satu aspek utama yang dihitung Cornhouse. Perusahaan saat ini mencatat pengiriman mete mencapai enam kontainer per hari, sementara pertumbuhan pasar diperkirakan sekitar 7 persen setiap tahun. Jika pasokan Sultra belum mencuk-

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026).

Kebutuhan bahan baku menjadi salah satu aspek utama yang dihitung Cornhouse. Perusahaan saat ini mencatat pengiriman mete mencapai enam kontainer per hari, sementara pertumbuhan pasar diperkirakan sekitar 7 persen setiap tahun. Jika pasokan Sultra belum mencuk-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Alvin Akawijaya Perkuat Bedah Rumah Kolaborasi Pemkab dan Kejaksaan Buton, Bantuan Warga Capai Rp45 Juta



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Upaya Pemerintah Kabupaten Buton memperluas penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat

tambahan dukungan pembiayaan dari Kejaksaan Negeri Buton dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Melalui kolaborasi tersebut, lima warga penerima bantuan bedah rumah mas-

ing-masing memperoleh dukungan senilai total Rp45 juta.

Tambahan dana tersebut diberikan dalam kegiatan yang berlangsung di kawasan belakang SPBU Pasarwajo, Selasa

(1/9/2026). Bantuan merupakan hasil kolaborasi Kejaksaan Negeri Buton dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dukungan dana aspirasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara, Ir. Ridwan Bae. Nilai bantuan yang sebelumnya Rp20 juta diperkuat tambahan Rp25 juta dari pihak kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, S.H., M.H., mengatakan tambahan tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses perbaikan rumah dapat

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Penguatan Sinergi dengan Kejaksaan pada Harlah ke-81



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP-Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., mendorong penguatan kolaborasi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tata kelola

pemerintahan berjalan tertib, bersih, dan berintegritas. Dorongan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di Lapangan Kejaksaan Negeri Buton, Pasarwajo, Rabu

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran Rumah di Desa Lasori



Laporan: Firman

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyalurkan bantuan kepada warga yang kehilangan rumah akibat kebakaran di Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur. Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menyerahkan langsung bantuan

sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada korban pada Rabu (2/9/2026), sehari setelah musibah terjadi.

Kehadiran Bupati bersama Kepala Dinas Sosial, Kasat Pol PP dan Damkar, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Desa Lasori

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Perkuat Keamanan Laut, Pos TNI AL Disiapkan di Buton Tengah



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah memperkuat kerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk

menjaga keamanan wilayah pesisir sekaligus membuka ruang pemanfaatan potensi kelautan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Langkah itu dibahas dalam pertemuan Bupati Buton

Tengah, Dr. Azhari, dengan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari, Kolonel Laut (P) M. Sati Lubis,

Lanjut ke Hal: 7

KUA-PPAS Perubahan 2026 Diserahkan, Wabup Rahman Soroti Kebutuhan Rakyat



Laporan: Ardi

BUTON UTARA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) mulai memasuki tahapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 setelah menyerahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Butur, Rabu (2/9/2026).

Penyerahan dokumen dilakukan Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, SKM., M.Kes., kepada Wakil Ketua DPRD Butur, Fatriah, S.Pd., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Utara. Tahapan ini menjadi pintu masuk pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif mengenai penyesuaian kebijakan serta alokasi anggaran daerah untuk tahun berjalan.

Rahman meminta proses pembahasan tidak sekadar berorientasi pada perubahan angka dalam dokumen anggaran. Menurut dia, setiap penyesuaian harus mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah

dan kebutuhan masyarakat sehingga belanja pemerintah tetap memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

“Rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting dalam menyesuaikan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat,” kata Rahman.

Ia juga mengharapkan pembahasan antara Pemkab Butur dan DPRD berlangsung konstruktif dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kesepakatan yang dihasilkan selanjutnya menjadi bagian dari proses penetapan Perubahan APBD 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penekanan terhadap efektivitas anggaran menjadi perhatian lain pemerintah daerah. Rahman menyatakan perubahan APBD harus diarahkan kepada program yang memiliki tingkat prioritas tinggi, dilaksanakan secara efisien, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh mas-

yarakat Buton Utara.

“Pemerintah daerah berkomitmen mengarahkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada program dan kegiatan yang prioritas, efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Secara historis, mekanisme KUA dan PPAS merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang berkembang dalam kerangka desentralisasi Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan PP Nomor 12 Tahun 2019 secara khusus mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Dalam perkembangan tata kelola keuangan daerah, perubahan APBD bukan sekadar agenda administratif. Regulasi memberikan ruang perubahan ketika terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, kebutuhan pergeseran anggaran, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran,

keadaan darurat, atau keadaan luar biasa.

Pedoman penyusunan APBD juga menekankan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai dokumen yang dibahas bersama kepala daerah dan DPRD sebelum tahapan penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD. Dengan demikian, pembahasan di DPRD Butur menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan kebijakan anggaran tetap konsisten dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Butur, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, para staf ahli bupati dan asisten sekretaris daerah, kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, serta Direktur RSUD Kabupaten Buton Utara. Setelah penyerahan ini, pemerintah daerah dan DPRD akan melanjutkan pembahasan terhadap arah perubahan kebijakan dan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026. (*)

Bocah 11 Tahun Meninggal di Puruk Cahu, DPR Desak Karhutla Ditangani Serius



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perlindungan kelompok rentan setelah seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun meninggal dunia di tengah kabut asap yang menyelimuti Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Daniel menilai kondisi tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan kebakaran, sebab asap karhutla dapat memperburuk kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan warga yang telah memiliki penyakit bawaan. Ia meminta pemerintah memastikan masker, oksigen, alat kesehatan, layanan medis, dan kebutuhan dasar tersedia bagi masyarakat yang terdampak.

“Paparan kabut asap sangat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat dan satwa. Orangutan sebagai satwa yang dilindungi bahkan sudah terkena dampaknya,” kata Daniel dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Korban sebelumnya mengalami sesak napas dan menjalani perawatan di RSUD Puruk Cahu sejak Jumat (28/8). Setelah beberapa hari mendapat perawatan, kondisi korban terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin (31/8) pagi. Saat itu, kabut asap akibat karhutla tengah menyelimuti wilayah Puruk Cahu.

Dinas Kesehatan Murung Raya menyatakan kematian korban belum dapat dikaitkan secara langsung dengan paparan asap atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya Suwirman Hutagalung menyebut korban juga mempunyai penyakit bawaan berupa kelainan pada ginjal.

“Anak tersebut juga sempat mengalami sesak napas, tapi tidak semerta-merta karena asap terus ISPA lalu meninggal. Namun, anak tersebut juga mengalami penyakit lain, yaitu kelainan yang terdapat pada ginjalnya,” ujar Suwirman.

Di sisi lain, Lulus Sriyati, tetangga korban, mengatakan keluarga menyebut anak terse-

but telah memiliki riwayat asma sejak berusia dua tahun. Menurut informasi keluarga yang diterimanya, kondisi asma korban semakin parah ketika kabut asap karhutla menyelimuti Kota Puruk Cahu. Keluarga bahkan sempat merencanakan membawa korban ke rumah sakit di Banjarmasin, tetapi rencana tersebut tidak terlaksana.

Daniel mengatakan pemerintah memang harus berhati-hati dalam menetapkan penyebab kematian seseorang dan tidak boleh membuat kesimpulan tanpa dasar medis. Namun, menurut dia, keberadaan penyakit bawaan justru membuat korban berada dalam kelompok yang lebih rentan terhadap memburuknya kualitas udara.

“Kita juga tidak bisa serta merta menyatakan kematian korban tidak ada kaitannya dengan kabut asap karena memang keadaan Karhutla sudah semakin buruk, terutama di Kalimantan,” ucap Daniel.

Kekhawatiran itu memiliki dasar historis. BNPB mencatat karhutla 2015 membakar sekitar 2,61 juta hektare lahan, dengan sekitar 600 ribu orang dilaporkan menderita ISPA dan 24 orang meninggal dunia. Pada 2019, luas lahan terbakar juga mencapai sekitar 2,6 juta hektare.

Dampak kabut asap juga pernah melampaui batas Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut kebakaran hutan dan lahan di Sumatra serta Kalimantan pada 2019 mengancam kesehatan hampir 10 juta anak, sementara sekitar 46 ribu sekolah sempat ditutup dalam periode yang berkepanjangan. Secara global, WHO juga mencatat kebakaran hutan dalam beberapa dekade terakhir menjadi persoalan kesehatan dan lingkungan di berbagai benua, dengan anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap paparan asap.

“Namun ketidakpastian penyebab tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengecilkan risiko,” kata Daniel. Ia meminta pemerintah menangani karhutla secara serius dan tidak sekadar berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mengantisipasi dampak kesehatan masyarakat serta kerusakan ekosistem. (*)

Perubahan KUA-PPAS 2026 Disepakati,
Sultra Siapkan 9 Ambulans Laut



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menambah tujuh unit ambulans laut melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tambahan tersebut membuat total ambulans laut yang direncanakan pemerintah provinsi pada tahun ini mencapai sembilan unit.

Penambahan armada itu menjadi bagian dari kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 antara Pemerintah Provinsi Sultra dan DPRD Sultra. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan di Gedung A Sekretariat DPRD Sultra, Kendari, Rabu (2/9/2026). Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menandatangani nota kesepakatan tersebut bersama pimpinan DPRD Sultra dalam rapat paripurna. Dokumen itu selanjutnya menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, dua unit ambulans laut telah dialokasikan dalam APBD induk 2026. Dengan tambahan tujuh unit melalui perubahan anggaran, kebutuhan pengadaan ambulans laut pada 2026 menjadi sembilan unit.

Armada tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan proses rujukan masyarakat antarpulau. Kebijakan ini menjadi penting karena kondisi geografis Sultra yang memiliki wilayah kepulauan membuat akses menuju fasilitas kesehatan tidak selalu dapat mengandalkan jalur darat.

Secara nasional, persoalan konektivitas kesehatan di wilayah kepulauan bukan hal baru. Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau dan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan masih dipengaruhi jarak, waktu tempuh, ketersediaan transportasi, serta kondisi ekonomi. Pada 2024, Indonesia memiliki 10.268 puskesmas, tetapi keberadaan fasilitas tersebut belum otomatis menghilangkan persoalan akses di daerah terpencil dan sangat terpencil.

Pengalaman pelayanan kesehatan berbasis laut juga telah berkembang di Indonesia. Kementerian Kesehatan sebelumnya mendukung layanan kesehatan bergerak melalui rumah sakit apung untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Pendekatan tersebut lahir dari kebutuhan menghadirkan pelayanan kesehatan di tengah karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Urgensi transportasi laut untuk pelayanan kesehatan turut terlihat dalam pengalaman tenaga kesehatan di kepulauan Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2025 mencatat tenaga kesehatan di Kepulauan Pangkajene harus menempuh perjalanan dengan perahu menuju pulau-pulau terpencil, bahkan dalam kondisi tertentu perjalanan dapat berlangsung hingga 24 jam.

Masalah serupa juga menjadi tantangan di kawasan kepulauan dunia. WHO menyebut negara-negara kepulauan Pasifik menghadapi kendala geografis, transportasi, biaya

operasional, serta keterbatasan fasilitas layanan spesialis sehingga sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain sektor kesehatan, Perubahan KUA dan PPAS 2026 Sultra juga mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar lainnya, termasuk pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta konektivitas wilayah kepulauan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dengan disepakatinya Perubahan KUA dan PPAS, Pemprov Sultra dan DPRD Sultra kini memiliki landasan untuk melanjutkan pembahasan menuju Perubahan APBD 2026. Penambahan sembilan ambulans laut diharapkan memperkuat sistem transportasi rujukan sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi hambatan geografis.(*)

Pemuatan Nikel Ore Dibahas, Pemkot
Kendari Tekankan Kepentingan
Masyarakat



Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memperkuat koordinasi untuk menindaklanjuti rencana kerja sama penanganan dan pemuatan nikel ore di Pelabuhan Kendari. Agenda tersebut dibahas dalam Coffee Morning yang digelar Pelindo di salah satu hotel di Kendari, Kamis (3/9/2026).

General Manager PT Pelindo Regional 4 Kendari, Herryanto, menyambut baik dukungan Pemerintah Kota Kendari terhadap keberadaan dan pengembangan pelabuhan. Ia berharap komunikasi antarpihak semakin solid sehingga rencana kerja sama dapat berjalan efektif dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah. “Sinergi antara Pelindo dan Pemerintah Kota Kendari perlu terus diperkuat agar berbagai rencana kerja sama dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” kata Herryanto.

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, mengatakan pengembangan pelabuhan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus konektivitas wilayah. Karena itu, pemerintah daerah menyambut setiap peluang optimalisasi fungsi pelabuhan yang dapat mendukung usaha dan investasi.

“Keberadaan Pelabuhan Kendari memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian dan konektivitas daerah,” ujar Amir.

Meski membuka ruang bagi pengembangan kegiatan usaha, Amir mengingatkan agar setiap bentuk kerja sama tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat Kota Kendari, menurut dia, harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Pembahasan pemuatan nikel ore menjadi salah satu agenda utama pertemuan tersebut. Pemerintah kota dan Pelindo diharapkan melanjutkan koordinasi bersama pemangku

kepentingan terkait agar kegiatan kepelabuhanan berlangsung tertib, produktif, dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Secara historis, posisi Kendari sebagai kota pelabuhan bukanlah fenomena baru. Pemerintah Kota Kendari mencatat Teluk Kendari telah menjadi tempat transit dan perdagangan sejak awal abad ke-19. Kajian sejarah juga menunjukkan pelabuhan Kendari berkembang sebagai penghubung jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi sejak abad ke-19.

Dalam konteks nasional, komoditas nikel juga telah mengalami perubahan besar dalam kebijakan perdagangan. Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel secara penuh mulai 1 Januari 2020 sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri. Kebijakan tersebut berkaitan erat dengan agenda pembangunan smelter dan hilirisasi mineral.

Perubahan kebijakan Indonesia tersebut turut menempatkan nikel sebagai komoditas strategis dalam rantai pasok industri global, terutama karena penggunaannya untuk industri baja tahan karat dan teknologi baterai. Bank Dunia mencatat Indonesia telah beberapa kali mengubah kebijakan ekspor bijih nikel sejak 2014, sebelum larangan ekspor mentah diberlakukan kembali secara menyeluruh pada 2020.

Dengan latar tersebut, Pemkot Kendari menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mengelola aktivitas kepelabuhanan. Optimalisasi Pelabuhan Kendari diharapkan tidak sekadar meningkatkan arus perdagangan dan kegiatan usaha, tetapi juga memperkuat konektivitas serta memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat dan daerah.(*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Hadiri HUT Kejaksaan ke-81, Tegaskan Komitmen Buton Perkuat Kerja Sama dengan Kejaksaan, Sinergi Lintas Daerah Diperkuat



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Buton sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H. saat menghadiri peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Buton, Pasarwajo, Rabu (2/9/2026).

Alvin menilai sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu dijaga secara berkelanjutan, bukan hanya ketika berlangsung kegiatan seremonial. Menurut dia, kondisi daerah yang aman dan kondusif merupakan salah satu prasyarat bagi pemerintah untuk menjalankan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton, saya menyampaikan selamat atas Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Kami dari pemerintah daerah tentu ingin terus memperkuat sinergi dan kerja sama bersama Kejaksaan,” ujar Alvin.

Peringatan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya koor-

dinasi lintas daerah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buton. Selain Alvin, hadir Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, S.STP., M.Si. dan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., bersama unsur Forkopimda serta jajaran instansi vertikal dari tiga daerah. Wilayah hukum Kejari Buton mencakup Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, S.H., M.H. yang memimpin upacara menyampaikan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia. Peringatan tahun ini mengusung tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil dan Humanis.” Tema tersebut menekankan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu ukuran penting dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Sterry menekankan bahwa orientasi penegakan hukum harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum, kata dia, tidak cukup hanya menjalankan aturan, tetapi juga harus memastikan proses hukum menghadirkan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat. “Kita sekarang harus mengedepankan masyarakat dalam mencari keadilan. Kita harus berlaku adil terhadap masyarakat,” katanya. Ia juga menjad-

ikan momentum HUT Kejaksaan sebagai ruang evaluasi bagi seluruh jajaran Adhyaksa. Integritas, profesionalitas, pola hidup sederhana, serta komunikasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap adap institusi penegak hukum.

Secara historis, Kejaksaan RI memiliki perjalanan yang panjang. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan lembaga penegak hukum tetap dipertahankan melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan PP Nomor 2 Tahun 1945. Dalam perkembangan berikutnya, Kejaksaan menjadi departemen yang mandiri dan terpisah dari Departemen Kehakiman melalui keputusan kabinet pada 22 Juli 1960 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960.

Tanggal 2 September memiliki makna historis tersendiri. Kejaksaan secara resmi menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Lahir Kejaksaan RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023, merujuk pada pelantikan Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung pertama pada 2 September 1945. Adapun 22 Juli diperingati sebagai Hari Bhakti Adhyaksa, yang berkaitan dengan perubahan kelembagaan Kejaksaan menjadi institusi mandiri pada 1960.

Dalam konteks internasional, prinsip

penegakan hukum yang adil dan tidak memihak juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1990, Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan di Havana mengadopsi Guidelines on the Role of Prosecutors, yang antara lain menekankan efektivitas, ketidakterbiasan, dan keadilan dalam pelaksanaan fungsi penuntutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Buton, pesan tersebut menjadi relevan dalam membangun tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial yang kondusif. Alvin berharap komunikasi dan koordinasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, serta Forkopimda terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai persoalan pembangunan berjalan dalam suasana aman.

“Saya berharap kita semua, Kejaksaan dan Forkopimda, tetap bersemangat menjaga stabilitas dan keamanan daerah,” katanya.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kejaksaan kemudian dilanjutkan dengan acara ramah tamah bersama jajaran Kejari Buton, para kepala daerah, Forkopimda, dan tamu undangan. Kegiatan ditutup dengan tasyakuran serta pemotongan nasi tumpeng sebagai ungkapan syukur atas perjalanan dan pengabdian Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. (*)

Wasuemba EXO 2026 Berakhir, Pemkab Buton Bidik Wisata Budaya Berkelanjutan



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton mendorong Kecamatan Wabula, khususnya Desa Wasuemba, berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang mampu menggabungkan kekayaan tradisi, potensi bahari, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Wasuemba EXO 2026 yang berlangsung selama lima hari dinilai menjadi momentum untuk memperkuat arah pengembangan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., mengatakan keberhasilan pelaksanaan Wasuemba EXO 2026 menunjukkan adanya modal sosial dan kreativitas masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan pariwisata. Ia menyampaikan hal itu saat menutup kegiatan di pelataran Kantor Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Minggu (30/8/2026) malam, mewakili Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H.

Menurut Syamsudin, pengembangan Wabula tidak cukup bertumpu pada penyelenggaraan kegiatan seremonial. Potensi budaya, UMKM, wisata pantai, serta bentangan laut perlu dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. “Kecamatan Wabula memiliki banyak potensi budaya, UMKM, wisata pantai dan bentangan laut yang indah. Semua ini harus dikelola dengan baik dan selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat,” katanya.

Ia berharap Wasuemba EXO dapat berkembang menjadi agenda budaya dan pariwisata masyarakat Wabula yang digelar secara rutin setiap tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, kata dia, diperlukan keber-

samaan, kekompakan, serta kemauan masyarakat untuk saling mendukung dalam proses pengembangan kawasan.

Potensi tersebut bukan sesuatu yang baru dikenali pemerintah daerah. Pada 2023, Pemerintah Kabupaten Buton telah mencatat Wasuemba sebagai salah satu destinasi wisata. Desa itu antara lain memiliki Jembatan Lingkar dengan keberadaan ikan purba di kawasan sekitarnya. Bahkan, data BPS Kabupaten Buton untuk 2020 mencatat Wasuemba memiliki objek wisata sejarah, wisata bahari, wisata alam, dan event tahunan.

Warisan sejarah juga menjadi bagian penting dari modal wisata Wasuemba. Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton mencatat Badili Wasuemba, meriam kuno yang dahulu menjadi bagian pertahanan masyarakat adat Wabula, sebagai benda cagar budaya yang ditetapkan melalui SK Nomor 489 Tahun 2021. Artefak tersebut disebut berbahan besi bergaya Eropa dan menjadi simbol pertahanan masyarakat adat setempat.

Wasuemba EXO 2026 sendiri berlangsung pada 26-30 Agustus dan diisi berbagai kegiatan budaya serta perlombaan tradisional. Pada pembukaan, tari kolosal melibatkan siswa SMP dan SMA dari Desa Wasuemba, Desa Wabula, dan Desa Wabula 1 bersama masyarakat sekitar 200 orang. Pengunjung juga disuguhi atraksi budaya bahari Pindoko atau menombak ikan.

Sejumlah permainan tradisional turut diperlombakan, yakni Kabangka-Bangka dengan 45 peserta, Katolinci 13 peserta, Kangkuru 20 peserta, Wasa Kasangkola 23 peserta, serta Kaeda 43 peserta. Ketua Panitia Wasuemba EXO 2026, Tamrin, menyam-

paikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Kepala Desa Wasuemba, La Tuni, S.Sos., juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Buton, terutama Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dukungan lintas perangkat daerah dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan dan memperluas promosi Wasuemba sebagai desa wisata.

Secara lebih luas, pengembangan wisata berbasis budaya sejalan dengan perkembangan pariwisata dunia yang sejak 1967 mendapat perhatian khusus melalui penetapan International Tourism Year oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema Tourism: Passport to Peace. Perkembangan itu menunjukkan bahwa pariwisata tidak semata dipandang sebagai perjalanan, tetapi juga dapat menjadi sarana mempertemukan masyarakat dan memperkuat nilai budaya. Bagi Buton, pendekatan tersebut dapat diterjemahkan dengan menjadikan tradisi lokal, warisan sejarah, kehidupan masyarakat, dan kekayaan bahari sebagai satu kesatuan pengalaman wisata.

Karena itu, Syamsudin berharap Wasuemba EXO tidak berhenti sebagai festival tahunan, tetapi menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya dan pariwisata. “Semoga kegiatan Wasuemba EXO ini tetap rutin berjalan setiap tahun dan insyaallah tahun depan ada bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Sultra, khususnya Dinas Pariwisata, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton,” ujarnya. (*)

Pembiayaan Kesehatan Dibangun Terintegrasi, BPJS dan Asuransi Disinergikan



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Pemerintah mendorong porsi pembiayaan kesehatan masyarakat melalui asuransi mencapai 80-90 persen untuk menekan beban biaya yang harus ditanggung individu sekaligus menjaga keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Langkah itu ditempuh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memperkuat kerja sama industri asuransi dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Penguatan ekosistem tersebut ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama oleh 50 perusahaan asuransi dan 70 rumah sakit di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Pemerintah berharap mekanisme pembayaran berbasis asuransi membuat masyarakat tidak harus menanggung sendiri biaya pelayanan ketika membutuhkan perawatan kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dari sekitar Rp640 triliun belanja kesehatan nasional per tahun, pemerintah menargetkan sekitar 60 persen dapat dib-

iyai melalui BPJS Kesehatan, sedangkan porsi lainnya diperkuat asuransi kesehatan komersial. “Supaya makin banyak kalau ada orang datang ke rumah sakit, yang bayar bukan dirinya sendiri, yang bayar bukan perusahaannya, tapi yang bayar adalah perusahaan asuransi,” ujarnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pilar keempat Transformasi Kesehatan, yakni transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Menurut Budi, sistem pembiayaan harus mampu membuat layanan kesehatan lebih murah bagi masyarakat, menghasilkan layanan optimal, sekaligus menciptakan ekosistem industri yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

Data historis menunjukkan kebutuhan memperkuat perlindungan finansial kesehatan masih besar. Pada 2014, ketika Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diterapkan, kurang dari separuh penduduk Indonesia memiliki perlindungan finansial kesehatan dan pengeluaran langsung masyarakat mencapai sekitar 45 persen dari belanja kesehatan. Hing-

ga Desember 2023, cakupan JKN telah melampaui 260 juta orang atau lebih dari 95 persen penduduk, sementara porsi out-of-pocket turun menjadi 27,5 persen.

Perkembangan itu berlanjut pada 2024. WHO mencatat total belanja kesehatan Indonesia mencapai Rp639,9 triliun, setara 2,9 persen PDB, dengan pembiayaan publik menyumbang 58,5 persen dan pengeluaran langsung masyarakat turun menjadi 28,3 persen. Dalam satu dekade, belanja kesehatan nasional hampir berlipat dua, terutama seiring meningkatnya pemanfaatan JKN.

Di tingkat global, persoalan beban biaya kesehatan juga menjadi tantangan pencapaian cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC). WHO mencatat sekitar dua miliar orang di dunia pada 2019 menghadapi kesulitan finansial akibat biaya kesehatan. Karena itu, penguatan mekanisme pembiayaan yang melindungi masyarakat dari pengeluaran kesehatan berlebihan menjadi bagian penting

agenda kesehatan global menuju 2030.

Untuk memperkuat mekanisme tersebut, OJK menerbitkan POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi ini antara lain mengatur desain produk, manajemen risiko, telaah utilisasi, koordinasi antarp Penyelenggara jaminan, serta kolaborasi perusahaan asuransi dengan fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Kepala Eksekutif Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan regulasi baru tersebut juga mengubah pendekatan co-payment menjadi risk sharing. “Kita merubah pengertian co-payment, karena co-payment seperti ini ada konotasi yang negatif. Jadi kita menggunakan risk sharing,” kata Ogi. OJK juga mendorong pembentukan Medical Advisory Board, penguatan koordinasi dengan BPJS, serta pertukaran data agar pembayaran dan pengelolaan klaim lebih efisien.

Ke depan, Kemenkes dan OJK mengarahkan integrasi BPJS Kesehatan dan asuransi komersial agar masyarakat yang memiliki lebih dari satu perlindungan tidak mengalami duplikasi pembiayaan. Sinergi antara 50 perusahaan asuransi dan 70 rumah sakit diharapkan menjadi pijakan menuju sistem pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efisien, melindungi masyarakat, dan berkelanjutan. (*)

Sekda Buton La Ode Syamsudin Perkuat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton memperkuat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dengan mendorong keterlibatan pemerintah hingga masyarakat di tingkat desa. Langkah itu ditempuh untuk memastikan intervensi terhadap anak dilakukan sejak dini dan tidak berhenti pada penanganan sektor kesehatan.

Penguatan kolaborasi tersebut menjadi agenda utama dalam sosialisasi Genting yang digelar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) di Aula Kantor Bupati Buton, Senin (31/8/2026). Kegiatan itu diikuti unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., mengatakan keberhasilan pencegahan stunting dipengaruhi banyak faktor sehingga membutuhkan kerja bersama. Aspek kesehatan, infrastruktur, sanitasi, hingga pola hidup sehat, menurut dia, saling berkaitan dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Ini bukan masalah OPD tertentu, tetapi masalah kita semua. Kolaborasi memperkuat kita dan membawa kita menuju hasil yang lebih baik,” kata

La Ode Syamsudin.

Ia meminta seluruh bentuk intervensi terhadap sasaran program dicatat dan didokumentasikan. Pencatatan dinilai penting untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat ditelusuri serta menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.

“Setelah diberikan bantuan harus dicatat. Ini penting agar seluruh upaya kita dalam melakukan pencegahan stunting terdokumentasi dengan baik,” ujarnya.

Gerakan orang tua asuh, lanjut dia, merupakan bentuk konkret kepedulian terhadap anak. Dukungan yang diberikan tidak harus berskala besar, tetapi dapat berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Buton.

Secara nasional, persoalan tersebut masih menjadi tantangan meskipun prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan. Data Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting balita Indonesia turun dari 37,6 persen pada 2013 menjadi 30,8 persen pada 2018, 24,4 persen pada 2021, 21,6 persen pada 2022, dan 21,5 persen pada 2023.

Tantangan serupa juga bersifat global. WHO mencatat sekitar

150,2 juta anak berusia di bawah lima tahun mengalami stunting pada 2024 atau sekitar 23,2 persen dari seluruh balita dunia. WHO, UNICEF, dan Bank Dunia juga menilai dunia masih berada di luar jalur untuk mencapai target pengurangan stunting hingga 2030.

La Ode Syamsudin menegaskan intervensi sejak sekarang diperlukan jika Buton ingin menyiapkan generasi yang sehat menuju 2045. “Kalau kita ingin menyelamatkan generasi emas 2045, kita harus mulai dari sekarang. Menyelamatkan satu anak merupakan investasi jangka panjang,” ungkapnya.

Pemkab Buton karena itu mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat memperkuat pelaksanaan Genting. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Buton Ny. Maimuna Moko Syarifudin, Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, S.H., M.H., Ketua IAD Buton Ny. Lady Sterry A., perwakilan Forkopimda, Sekban BKKBN Sultra Ariyanto Gamar, S.H., M.Sos., para kepala OPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Buton. (*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Rinin
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kasus MBG, Kejagung Sita Aset Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Kejaksaan Agung menyita aset dan uang tunai dalam berbagai mata uang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026. Dari eks Kepala BGN Dadan Hindayana, penyidik mengamankan aset dengan nilai estimasi mencapai Rp8.436.069.815, termasuk jam tangan Rolex, kendaraan, serta uang tunai dalam rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap dugaan penyimpanan pengelolaan MBG. "Penyitaan dari Tersangka DH nilai estimasi atau total aset disita diperkirakan sebesar Rp8.436.069.815," kata Anang dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Selain aset milik Dadan, penyidik mengamankan barang bukti dari eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony. Dari Sony, penyidik menyita satu jam tangan analog merek Bell & Ross berkode 3500BR-X33500208 beserta kotaknya, 11 cincin dengan batu permata, serta satu batu permata.

Dari Asep, penyidik menyita satu BMW 740 LI AT warna putih, satu Toyota Alphard 2.5X A/T warna hitam, serta uang



Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset barang mewah hingga uang tunai milik eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana beserta eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.

tunai USD 8.658 dan SGD 1.800. Penyitaan tersebut memperluas jejak barang bukti yang kini dikaitkan penyidik dengan perkara tata kelola program MBG.

Sebagian barang bukti milik Dadan ditemukan di sejumlah kendaraan yang diduga berada di sebuah apartemen di Sentul, Jawa Barat. Pada Suzuki Carry Pickup putih bernomor polisi D 8649 UK, penyidik menemukan USD 240.000 dalam box besi warna biru. Dari Honda WRV merah bernomor polisi F 1527 ABX, diamankan USD 20.000 serta uang rupiah Rp4.950.000, Rp4.000.000, dan Rp990.000. Sementara Toyota Avanza putih bernomor polisi B 1547 SZP menyimpan uang tunai Rp24.500.000.

Penyidik juga menyita sebuah kotak hijau berisi jam tangan Rolex model 52509 dengan nomor seri 1J1R8052 yang ditaksir bernilai Rp300 juta serta Toyota Innova Zenix hitam bernomor polisi B 1652 EII. Dalam sebuah cash box turut ditemukan SGD 75.000, SGD 30.000, USD

20.000, USD 1.600, SGD 900, SGD 900, SGD 44.000, dan Rp20 juta.

Kejagung sejauh ini memproses sedikitnya tujuh tersangka dalam perkara tersebut. Mereka ialah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Menurut konstruksi perkara yang disampaikan Kejagung, pengelolaan MBG semestinya melibatkan yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Namun, penyidik menduga sejumlah SPPG ditunjuk karena memiliki hubungan dengan petinggi BGN, sementara sebagian yayasan disebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra SPPG.

Dugaan peny-

impangan juga mencakup penggelembungan harga pengadaan barang yang dinilai tidak mendukung kebutuhan operasional MBG. Barang yang disebut dalam perkara antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kasus ini mencuat ketika MBG tengah menjadi salah satu program sosial berskala besar pemerintah. BGN secara resmi memulai pelaksanaan MBG pada 6 Januari 2025 melalui SPPG secara bertahap. Pada awal pelaksanaan, terdapat 190 SPPG, sedangkan hingga awal Januari 2026 BGN menyatakan jumlahnya telah berkembang menjadi 19.188 SPPG di 38 provinsi dengan sekitar 55,1 juta penerima manfaat.

Secara global, program makan sekolah bukan konsep baru. World Food Programme (WFP) mencatat sejarah program makan sekolah telah berlangsung selama berabad-abad dan salah satu catatan terdokumentasi berasal dari 1790 di Munich, Jerman. WFP sendiri memulai program makan sekolah di Togo pada 1963. Dalam perkembangan terbaru, sedikitnya 466 juta anak di dunia menerima makanan melalui program makan sekolah, menunjukkan bahwa kebijakan pangan untuk pelajar telah berkembang menjadi instrumen gizi, pendidikan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi lokal. (*)

Dua Anggota BAIS Batal Dipecat, Vonis Kasus Andrie Yunus Dipangkas



Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Dua anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus, batal dipecat dari dinas militer setelah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengabulkan banding mereka. Selain menghapus pidana tambahan berupa pemecatan, majelis juga memangkas hukuman penjara kedua terdakwa.

Putusan bernomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 itu dijatuhkan pada 20 Agustus 2026 dan kemudian diketahui publik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Jumat (4/9). Pengadilan mengubah putusan tingkat pertama terhadap Serda Mar Edi Sudarko dan Lettu Mar Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, sementara hukuman dua terdakwa lainnya tetap.

Edi yang sebelumnya dihukum tiga tahun penjara dan dipecat dari dinas militer kini dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan tanpa pemecatan. Adapun Budhi yang semula divonis dua tahun enam bulan penjara dan dipecat, hukumannya menjadi dua tahun penjara tanpa pidana tambahan tersebut. Kapten Mar Nandala Dwi Prasetya tetap dihukum dua tahun, sedangkan Lettu Pas Sami Lakka tetap menjalani hukuman satu tahun enam bulan.

Keempat terdakwa sebelumnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusan 10 Juni 2026. Edi dan Budhi disebut berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, sedangkan Nandala dan Sami dinilai memiliki tingkat kesalahan yang berbeda sehingga memperoleh hukuman lebih ringan pada tingkat pertama. Majelis saat itu juga

menyatakan tindakan tersebut bukan operasi intelijen yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Perubahan putusan itu bermula dari langka hukum para terdakwa setelah vonis tingkat pertama dibacakan. Keempatnya mengajukan banding pada hari yang sama dengan pembacaan putusan, sementara oditur militer tidak mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, perkara tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding.

Amar putusan banding menyatakan permohonan para terdakwa diterima secara formal. Hakim memerintahkan keempat terdakwa tetap ditahan. Namun, terhadap Edi dan Budhi, putusan tingkat pertama diubah khusus pada aspek pemidanaan sehingga keduanya tidak lagi dikenai sanksi pemecatan dari dinas militer.

Putusan tersebut menuai kritik Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Kelompok tersebut mempertanyakan dasar perubahan hukuman sekaligus menilai penghapusan pemecatan dapat memperkuat persepsi publik mengenai impunitas dalam mekanisme peradilan militer. Jane Rosalina Rumpia dari KontraS yang tergabung dalam TAUD mengatakan amar putusan juga menimbulkan persoalan mengenai kejelasan status pidana tambahan yang sebelumnya dijatuhkan kepada Edi dan Budhi.

"Ketidakjelasan dalam amar putusan tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan publik bahwa peradilan militer merupakan infrastruktur impunitas dan wadah untuk melindungi sesama prajurit," kata Jane dalam keterangan pers, Jumat (4/9).

Secara kelembagaan, perkara tersebut diproses melalui sistem peradilan militer yang memiliki dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer. Undang-undang yang ditetapkan pada 15 Oktober 1997 itu mengatur lingkungan peradilan militer, termasuk Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Perdebatan mengenai akuntabilitas personel militer melalui pengadilan khusus sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Seusai Perang Dunia II, Sekutu membentuk International Military Tribunal di Nuremberg untuk mengadili para pemimpin politik dan militer Jerman atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Pengadilan tersebut mulai bersidang pada 20 November 1945 dan kemudian menjadi salah satu tonggak perkembangan hukum pidana internasional.

Di Indonesia, keberadaan peradilan militer juga memiliki sejarah panjang. Sistem tersebut berkembang sejak masa awal kemerdekaan dan mengalami sejumlah perubahan, sebelum akhirnya landasan hukumnya diperbarui melalui UU Nomor 31 Tahun 1997. Dalam perkembangan internasional, pengalaman Nuremberg dan Tokyo kemudian turut membentuk gagasan bahwa status militer tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban individual atas suatu tindak pidana.

Menanggapi putusan tersebut, Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI tidak melakukan intervensi terhadap proses maupun hasil persidangan. Menurut dia, perkara tersebut merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung.

"TNI menghormati dan menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara," ujar Nas melalui pesan tertulis, Jumat malam. (*)

Baubau Jadi Pintu Masuk Investasi Cornhouse, Pabrik Mete 30 Ribu Ton Dikaji

upi, bahan baku akan ditopang dari daerah lain, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Flores. Sebaliknya, saat panen raya, perusahaan menyiaipkan mekanisme penyimpanan stok untuk menjaga kesinambungan produksi.

Rencana tersebut berpotensi mengubah posisi petani dalam rantai nilai komoditas mete. Cornhouse memproyeksikan harga pembelian mete mentah dari petani lokal dapat mencapai Rp35.000 per kilogram. Dengan asumsi rendemen (ricinut) 285 gram per kilogram, perusahaan menilai produk olahan dari Sultra masih kompetitif dibandingkan harga mete di Vietnam yang disebut berada

di kisaran Rp116.000 per kilogram. “Dengan kalkulasi harga beli Rp35.000 di tingkat petani, kita masih sanggup bersaing dengan harga mete di Vietnam,” ujar Andriza.

Pengembangan industri tersebut juga memiliki konteks historis di Sultra. Jambu mete sejak dekade 1970-an banyak dikembangkan sebagai bagian dari penghijauan lahan kritis. Kajian Kementerian Pertanian menyebut sejumlah pertanaman mete di Sultra berasal dari pengembangan pada periode tersebut dan sebagian telah berumur lebih dari 30 tahun. Pada 1997, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kendari bahkan telah mencatat jambu mete sebagai salah satu komoditas andalan

Sultra, meski produktivitasnya ketika itu masih rendah karena pola pengelolaan yang konvensional.

Secara nasional, industri mete juga memiliki sejarah panjang. Data Ditjen Perkebunan menunjukkan produksi jambu mete Indonesia mencapai 135.070 ton pada 2005, meningkat menjadi 149.138 ton pada 2006, kemudian turun menjadi 133.282 ton pada 2009. Pada periode yang sama, luas areal jambu mete Indonesia mencapai 566.394 hektare pada 2009. Sementara secara global, posisi Vietnam sebagai pusat pengolahan mete telah terbentuk sejak lama. Bank Dunia mencatat Vietnam menjadi eksportir mete terbesar secara nilai pada 2008 dan memiliki keunggu-

lan berupa skala kapasitas pengolahan yang besar.

Dengan latar tersebut, rencana Cornhouse tidak hanya menysasar penambahan kapasitas pengolahan, tetapi juga peluang memindahkan sebagian nilai tambah lebih dekat ke sumber bahan baku. BPS sendiri secara rutin mencatat komoditas jambu mete dalam statistik perkebunan nasional serta perkembangan ekspor-impor menurut provinsi dan negara tujuan. Jika studi kelayakan berujung pada keputusan investasi, pabrik tersebut berpotensi menjadikan Sultra bukan sekadar pemasok bahan mentah, melainkan salah satu basis pengolahan mete untuk pasar internasional.(*)

menunjukkan penanganan bencana dilakukan secara bersama. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan korban setelah rumahnya tidak lagi dapat ditempati.

Kebakaran terjadi pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 15.10 WITA dan menghancurkan satu unit rumah milik Wa Mula. Kobaran api yang cepat membesar membuat bangunan tidak dapat diselamatkan meskipun warga telah berupaya melakukan pemadaman. Kerugian materiil akibat kejadian itu diperkirakan mencapai Rp60 juta.

Bupati Azhari menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut sekaligus memastikan pemerintah daerah tetap hadir ketika masyarakat menghadapi bencana. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus mendukung proses pemulihan.

“Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkomitmen untuk selalu hadir dan memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama saat menghadapi musibah seperti ini. Semoga bantuan ini dapat membantu proses pemulihan dan memberikan semangat baru bagi warga yang terdampak,” kata Azhari.

Di luar penanganan korban, Azhari meminta masyarakat memperkuat langkah pencegahan kebakaran. Warga diminta tidak membakar sampah sembarangan dan memastikan instalasi listrik di

rumah dalam kondisi aman. Kewaspadaan juga diperlukan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama ketika kondisi kemarau meningkatkan risiko muncul dan meluasnya api.

Secara nasional, karhutla bukan persoalan baru. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas karhutla Indonesia mencapai sekitar 2,61 juta hektare pada 2015 dan 1,65 juta hektare pada 2019. Pemerintah mencatat fenomena El Nino dan panjangnya periode tanpa hujan sebagai salah satu faktor yang memperbesar risiko karhutla pada 2019.

Ancaman kebakaran juga memiliki dimensi global. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat El Nino 2015-2016 termasuk salah satu episode terkuat yang pernah terjadi, dengan suhu permukaan laut di Pasifik tropis bagian tengah dan timur mencapai lebih dari 2 derajat Celsius di atas rata-rata pada akhir 2015. Pada periode tersebut, kebakaran gambut di Indonesia turut berkembang menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan berskala besar.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah meminta warga segera melaporkan keberadaan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Musibah di Desa Lasori menjadi pengingat bahwa pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung pada petugas pemadam, tetapi juga pada kewaspadaan dan kepedulian masyarakat sejak dari lingkungan rumah masing-masing.(*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Penguatan Sinergi dengan Kejaksaan pada Harlah ke-81

(2/9/2026).

Menurut Adios, hubungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak sebatas dalam penanganan persoalan hukum, tetapi juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan. Ia berharap kerja sama antarlembaga di wilayah Buton Raya semakin efektif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. “Pemerintah daerah tentu mendukung penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum. Kita ingin pemerintahan berjalan dengan baik dan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Adios.

Adios juga menilai peringatan Harlah Kejaksaan ke-81 harus menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik. Menurut dia, penegakan hukum yang profesional perlu berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang transparan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus pelayanan publik yang lebih baik. “Kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah di kawasan Buton Raya,” ujarnya.

Dalam peringatan tersebut, semangat yang diusung adalah penguatan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang berintegritas, adil, dan humanis. Dalam sambutan Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H., insan Adhyaksa diingatkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme, termasuk mengedepankan keadilan restoratif dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Pendekatan tersebut memiliki perkembangan panjang dalam praktik hukum dunia. Pada 24 Juli 2002, Dewan Ekonomi dan Sosial Perser-

ikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) mengadopsi Resolusi 2002/12 tentang prinsip-prinsip dasar penggunaan program keadilan restoratif dalam perkara pidana. Resolusi itu menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian penting dalam pendekatan terhadap tindak pidana.

Secara historis, Kejaksaan RI sendiri memiliki akar sejak awal berdirinya Republik. Secara yuridis, keberadaan Kejaksaan telah berlangsung sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pada 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan kedudukannya dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Tonggak yang kemudian digunakan sebagai dasar Hari Lahir Kejaksaan adalah pelantikan Jaksa Agung pertama, R. Gatot Taroenamihardja, pada 2 September 1945.

Upacara di Pasarwajo tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, S.H., M.H., Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, S.STP., M.Si., serta jajaran Forkopimda. Dari Pemkab Buton Selatan hadir Sekda La Ode Harwanto, Ketua TP PKK Hj. Siti Norma Adios, Ketua Dharma Wanita Persatuan Wa Ode Dang Arafah Harwanto, A.M.Keb., dan sejumlah kepala OPD.

Bagi Pemkab Buton Selatan, momentum Harlah Kejaksaan ke-81 sekaligus menjadi ruang memperkuat komunikasi kelembagaan di kawasan Buton Raya. Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung pemerintahan yang efektif, penegakan hukum yang berkeadilan, dan percepatan pembangunan daerah.(*)

Bupati Alvin Akawijaya Perkuat Bedah Rumah Kolaborasi Pemkab dan Kejaksaan Buton, Bantuan Warga Capai Rp45 Juta

kami tambahkan Rp25 juta sehingga penerima menerima total Rp45 juta,” kata Sterry. Ia menekankan bantuan harus tepat sasaran dan pelaksanaannya diawasi hingga pekerjaan selesai.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., menempatkan program bedah rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar yang terus diperjuangkan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak. Menurut dia, keterlibatan banyak pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan program. “Bedah rumah ini menjadi salah satu prioritas kita, setiap ke pusat kami terus koordinasikan dan Alhamdulillah kita dapat,” ujar Alvin.

Pemkab Buton sebelumnya telah memperoleh bantuan penanganan RTLH sebanyak 506 unit. Capaian itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih aman dan layak. Pemerintah kabupaten berkomitmen melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, DPR RI, kejaksaan, dan lembaga lainnya agar semakin banyak keluarga memperoleh manfaat.

Kebijakan tersebut sejalan dengan

persoalan perumahan nasional yang hingga kini masih besar. Data Badan Pusat Statistik pada 2026 mencatat sekitar 18,01 juta rumah tangga berada dalam kategori backlog kepemilikan sekaligus kondisi hunian yang belum memenuhi kriteria layak huni (backlog 2), meskipun angka tersebut turun dari sekitar 18,77 juta rumah tangga pada 2025.

Secara historis, persoalan rumah layak huni juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia melalui berbagai skema bantuan, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Data Kementerian PUPR menunjukkan realisasi BSPS secara kumulatif mencapai 1.094.337 unit sepanjang 2015â€2021. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah agar memenuhi aspek keselamatan, kecukupan luas, dan

kesehatan.

Di tingkat global, kebutuhan terhadap hunian layak telah ditempatkan sebagai bagian dari hak dasar manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi PBB pada 10 Desember 1948 menyebut hak atas standar hidup yang layak, termasuk perumahan. Pada 1986 dan 1987, Majelis Umum PBB kembali menegaskan pentingnya pemenuhan hak atas perumahan yang layak.

“Kami berharap rumah yang telah diperbaiki dijaga dan dirawat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” pesan Alvin. Kegiatan penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Buton Mararusli Sihaji, S.H., Ketua IAD Buton Ny. Lady Sterry A., perwakilan Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, serta masyarakat calon penerima bantuan.(*)

Bupati Azhari Perkuat Keamanan Laut, Pos TNI AL Disiapkan di Buton Tengah

M.Sc., CHRMP, di Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan tersebut salah satunya membahas rencana pengoperasian Pos TNI AL di Buton Tengah. Kehadiran pos itu diharapkan memperkuat pengawasan serta keamanan kawasan laut, terutama untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengembangkan aktivitas ekonominya pada sektor maritim.

Bagi Buton Tengah, penguatan keamanan laut memiliki arti strategis karena pemerintah daerah tengah mendorong pengembangan berbagai potensi sumber daya pesisir. Bupati Azhari menyebut pengembangan transmarin dan budidaya perikanan pesisir sebagai sektor yang dapat menjadi penopang ekonomi daerah apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Pengelolaan sumber daya laut, termasuk komoditas potensial seperti lobster, kepiting rajungan, hingga ikan teri, membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan,” kata Azhari. Ia menambahkan, kerja sama dengan TNI AL diarahkan agar potensi tersebut memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat Buton Tengah.

Penguatan peran aparat di wilayah laut juga memiliki pijakan historis da-

lam perjalanan Indonesia sebagai negara kepulauan. BKR Laut yang menjadi cikal bakal TNI AL dibentuk pada 10 September 1945, tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam perkembangannya, kekuatan tersebut berubah menjadi TKR Laut dan kemudian Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan pangkalan sebagai salah satu unsur penting pertahanan maritim.

Dalam konteks Sulawesi, sejarah pengembangan kekuatan laut juga berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada 1945, ekspedisi dari Jawa menuju Sulawesi dilakukan untuk membangun kontak dengan para pejuang dan mendorong pembentukan kekuatan laut di wilayah tersebut. Perkembangan itu menunjukkan bahwa pengamanan wilayah perairan sejak masa awal kemerdekaan berkaitan erat dengan kebutuhan menjaga kedaulatan sekaligus konektivitas antarpulau.

Kunjungan Danlanal

Kendari bersama jajaran itu merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja di wilayah kerja Pos TNI AL Baubau. Bagi Pemkab Buton Tengah, komunikasi tersebut diharapkan berkembang menjadi kolaborasi teknis dalam menjaga stabilitas keamanan maritim yang sekaligus menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuhnya investasi dan kegiatan ekonomi berbasis kelautan.

Melalui rencana pengoperasian Pos TNI AL dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Buton Tengah berharap kawasan pesisir tidak hanya semakin aman, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Sinergi pemerintah daerah dan TNI AL diarahkan untuk mendukung pembangunan Buton Tengah sebagai daerah kepulauan yang aman, mandiri, dan sejahtera.(*)

Utusan Presiden Wahyu Andrianto Dorong Baubau Jadi Pusat Hilirisasi Mete, Minta Libatkan Petani dan UMKM



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Kota Baubau didorong mengambil posisi lebih strategis dalam rantai industri jambu mete di Sulawesi Tenggara dengan tidak lagi bertumpu pada perdagangan bahan mentah. Penguatan industri pengolahan dari hulu hingga hilir dinilai dapat membuka nilai tambah bagi petani, memperluas ruang usaha UMKM, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjadikan Baubau sebagai pintu pemasaran produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Dorongan tersebut disampaikan Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Wahyu Andrianto, sesuai menemui Wali Kota Baubau untuk membahas pengembangan potensi komoditas jambu mete di Kota Baubau, Rabu (2/9/2026). Ia menilai posisi Baubau sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di kawasan Kepulauan Buton dapat menjadi modal penting untuk membangun ekosistem industri mete.

Menurut Wahyu, hilirisasi harus membuat komoditas yang berasal dari daerah menghasilkan manfaat lebih besar di daerah asalnya. Karena itu, investasi tidak cukup hanya menjamin penyerapan bahan baku, tetapi harus disertai pembangunan industri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pertumbuhan UMKM.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, semua harus ada nilai tambah. Itu tercermin dari program hilirisasi kita. Kita masuk dari

kacang mete atau produk kacang-kacangan lainnya, harus ada nilai tambahnya agar nantinya dinikmati mulai dari industri yang ada di sini, baik UMKM bahkan petani," ujar Wahyu.

Gagasan tersebut sejalan dengan arah kebijakan industrialisasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi untuk memperdalam struktur industri dan meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Kementerian Perindustrian mencatat kebijakan hilirisasi diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan nilai produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan devisa ekspor.

Dalam konteks jambu mete, peluang hilirisasi tidak sebatas menghasilkan kacang mete siap konsumsi. Secara global, tanaman *Anacardium occidentale* berasal dari Brasil dan menyebar ke berbagai kawasan tropis setelah dibawa bangsa Portugis ke India dan Afrika pada abad ke-16. Setelah Perang Dunia II, produksi dan konsumsi mete dunia meningkat tajam sehingga komoditas tersebut berkembang menjadi salah satu kacang perdagangan penting dunia.

Sejarah perdagangan mete juga menunjukkan bahwa pengolahan dapat menjadi penentu posisi suatu negara dalam rantai nilai global. India, misalnya, mulai memanfaatkan perdagangan internasional kernel mete pada awal

abad ke-20 dan kemudian berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam perdagangan produk mete dunia. Data tersebut memberi gambaran bahwa komoditas yang tumbuh di wilayah tropis dapat berkembang menjadi industri apabila didukung pengolahan, perdagangan, teknologi, dan pasar.

Karena itu, Wahyu menilai investasi dari luar daerah maupun luar negeri tetap diperlukan selama memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal. "Siapa pun yang mau berinvestasi di Indonesia selama itu memberikan nilai tambah dan bisa meningkatkan industrialisasi di sini, itu pasti kita sangat dukung," tegasnya. Kehadiran investor diharapkan membantu menjamin ketersediaan bahan baku, membuka akses pasar, dan menciptakan peluang harga yang lebih baik bagi komoditas petani.

Namun, industrialisasi mete di Sulawesi Tenggara tidak boleh berjalan terpisah dari masyarakat. Wahyu menekankan pentingnya membangun mata rantai yang menghubungkan petani sebagai pemasok bahan baku, industri sebagai pengolah, serta UMKM dan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari ekosistem produksi. "Harus dibarengi dengan pembangunan dan investasi industri yang ada di Sulawesi Tenggara dan melibatkan atau bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sini. Juga dicari cara bagaimana agar UMKM-nya bisa tumbuh di sini," ujarnya.

Perhatian juga di-

arahkan kepada Generasi Z yang dinilai memiliki karakter berbeda dalam memasuki dunia usaha. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi dapat masuk ke rantai industri melalui pengolahan, pemasaran digital, pengembangan merek, inovasi produk, dan kewirausahaan. Dari sisi tugasnya di bidang UMKM, ekonomi kreatif, dan digital, Wahyu menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi serta pengembangan kekayaan intelektual menjadi dua hal yang akan diperhatikan untuk disampaikan kepada Presiden.

"Bagaimana kekayaan intelektual itu menjadi sumber harta karun, supaya industri mete itu dengan sentuhan kreatif bisa membuat ekonomi yang baru," katanya.

Dengan posisi Baubau sebagai salah satu simpul perdagangan dan jasa di Kepulauan Buton, penguatan konektivitas dan layanan perdagangan dinilai menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Baubau diharapkan mampu menjadi pintu pasar bagi produk-produk dari daerah sekitar, termasuk komoditas perkebunan jambu mete. Jika ekosistem itu terbentuk, hilirisasi tidak hanya mengubah bentuk komoditas, tetapi juga menggeser pusat manfaat ekonomi dari sekadar penjualan bahan mentah menuju industri, inovasi, UMKM, tenaga kerja, dan pasar yang lebih luas. (*)

Utusan Presiden Wahyu Andrianto Dorong Baubau Masuk Rantai Industri Mete Global, Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baubau



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Kota Baubau didorong mengambil posisi lebih strategis dalam rantai industri jambu mete di Sulawesi Tenggara dengan tidak lagi bertumpu pada perdagangan bahan mentah. Penguatan industri pengolahan dari hulu hingga hilir dinilai dapat membuka nilai tambah bagi petani, memperluas ruang usaha UMKM, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjadikan Baubau sebagai pintu pemasaran produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Dorongan tersebut disampaikan Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Wahyu Andrianto, sesuai menemui Wali Kota Baubau untuk membahas pengembangan potensi komoditas jambu mete di Kota Baubau, Rabu (2/9/2026). Ia menilai posisi Baubau sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di kawasan Kepulauan Buton dapat menjadi modal penting untuk membangun ekosistem industri mete.

Menurut Wahyu, hilirisasi harus membuat komoditas yang berasal dari daerah menghasilkan manfaat lebih besar di daerah asalnya. Karena itu, investasi tidak cukup hanya menjamin penyerapan bahan baku, tetapi harus disertai pembangunan industri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pertumbuhan UMKM.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, semua harus ada nilai tambah. Itu tercermin dari program hilirisasi kita. Kita masuk dari kacang mete atau produk kacang-kacangan lainnya, harus ada nilai tambahnya agar nantinya dinikmati mulai dari industri yang ada di sini, baik UMKM bahkan petani," ujar Wahyu.

Gagasan tersebut sejalan dengan arah kebijakan industrialisasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi untuk memperdalam struktur industri dan meningkatkan nilai

tambah komoditas di dalam negeri. Kementerian Perindustrian mencatat kebijakan hilirisasi diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan nilai produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan devisa ekspor.

Dalam konteks jambu mete, peluang hilirisasi tidak sebatas menghasilkan kacang mete siap konsumsi. Secara global, tanaman *Anacardium occidentale* berasal dari Brasil dan menyebar ke berbagai kawasan tropis setelah dibawa bangsa Portugis ke India dan Afrika pada abad ke-16. Setelah Perang Dunia II, produksi dan konsumsi mete dunia meningkat tajam sehingga komoditas tersebut berkembang menjadi salah satu kacang perdagangan penting dunia.

Sejarah perdagangan mete juga menunjukkan bahwa pengolahan dapat menjadi penentu posisi suatu negara dalam rantai nilai global. India, misalnya, mulai memanfaatkan perdagangan internasional kernel mete pada awal abad ke-20 dan kemudian berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam perdagangan produk mete dunia. Data tersebut memberi gambaran bahwa komoditas yang tumbuh di wilayah tropis dapat berkembang menjadi industri apabila didukung pengolahan, perdagangan, teknologi, dan pasar.

Karena itu, Wahyu menilai investasi dari luar daerah maupun luar negeri tetap diperlukan selama memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal. "Siapa pun yang mau berinvestasi di Indonesia selama itu memberikan nilai tambah dan bisa meningkatkan industrialisasi di sini, itu pasti kita sangat dukung," tegasnya. Kehadiran investor diharapkan membantu menjamin ketersediaan bahan baku, membuka akses pasar, dan menciptakan peluang harga yang lebih baik bagi komoditas petani.

Namun, industrial-

isasi mete di Sulawesi Tenggara tidak boleh berjalan terpisah dari masyarakat. Wahyu menekankan pentingnya membangun mata rantai yang menghubungkan petani sebagai pemasok bahan baku, industri sebagai pengolah, serta UMKM dan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari ekosistem produksi. "Harus dibarengi dengan pembangunan dan investasi industri yang ada di Sulawesi Tenggara dan melibatkan atau bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sini. Juga dicari cara bagaimana agar UMKM-nya bisa tumbuh di sini," ujarnya.

Perhatian juga diarahkan kepada Generasi Z yang dinilai memiliki karakter berbeda dalam memasuki dunia usaha. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi dapat masuk ke rantai industri melalui pengolahan, pemasaran digital, pengembangan merek, inovasi produk, dan kewirausahaan. Dari sisi tugasnya di bidang UMKM, ekonomi kreatif, dan digital, Wahyu menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi serta pengembangan kekayaan intelektual menjadi dua hal yang akan diperhatikan untuk disampaikan kepada Presiden.

"Bagaimana kekayaan intelektual itu menjadi sumber harta karun, supaya industri mete itu dengan sentuhan kreatif bisa membuat ekonomi yang baru," katanya.

Dengan posisi Baubau sebagai salah satu simpul perdagangan dan jasa di Kepulauan Buton, penguatan konektivitas dan layanan perdagangan dinilai menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Baubau diharapkan mampu menjadi pintu pasar bagi produk-produk dari daerah sekitar, termasuk komoditas perkebunan jambu mete. Jika ekosistem itu terbentuk, hilirisasi tidak hanya mengubah bentuk komoditas, tetapi juga menggeser pusat manfaat ekonomi dari sekadar penjualan bahan mentah menuju industri, inovasi, UMKM, tenaga kerja, dan pasar yang lebih luas. (*)